BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 101 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Jalan Pengabdian No 1. Kode Pos 97752
Maluku utara
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini;

KEDUA : *Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum* kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu Sekretariat Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 17 juni 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth.Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2014
TANGGAL 17 juni 2014

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM
1.	Sekretaris Daerah Kab.Halbar	Pengarah	Rp. 750.000
2.	Ass.Bid.Pem.& Adm.Umum.Setda Kab.Halbar	Pengarah	Rp. 750.000
3.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Penanggungjawab	Rp. 700.000
4.	Ati Djohar, SH, M.Si	Ketua	Rp. 650.000
5.	Fransius Lenge, SH	Wakil Ketua	Rp. 600.000
6.	Jason K.Lalomo,SH.LLM	Sekretaris	Rp. 500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2014
TANGGAL 17 Juni 2014

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA RANHAM DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI RANHAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Rp. 500.000	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Rp. 500.000	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
4.	Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
5.	Kepala Kepolisian Resort Halmahera Barat	Rp. 500.000	
6.	Bataliyon 732 Banau	Rp. 500.000	
7.	Kejaksaan Negeri Cabang Jailolo	Rp. 500.000	
8.	Kantor Agama Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
9.	Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
10.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
11.	Badan Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
12.	BPMD Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
13.	BLH Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
14.	BKD Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
15.	BKKB-KS Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
16.	KP3A Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
17.	Kanpora, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Halmahera Barat	Rp. 500.000	
18.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000 Rp. 500.000	
19.	Kantor Tata Kota dan Damkar Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
20.	Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
21.	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
22.	Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
23.	Dinas Capilduk Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
24.	DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
25.	Dinas Perhubungan & Infokom Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
26.	Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
27.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
28.	Disperindag Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
29.	Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
30.	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
31.	Dinas Nakertrans dan PPH Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
32.	Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
33.	Satpol PP Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
34.	Bagian Hukum dan Orgs Setda Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
35.	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
36.	Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
37.	Bagian Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
38.	Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
39.	Bagian Humas Setda Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 500.000	
40.	Rektor STPK Banau	Rp. 500.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2014
TANGGAL 17 Juni 2014

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN TIM RANHAM PROVINSI DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Kadiv Yankun Kemenkum Ham Provinsi Maluku Utara	Rp. 750.000	
2.	Kabid HAM Kemenkum Ham Provinsi Maluku Utara	Rp. 750.000	
3.	Kasubbid Perlindungan & Pemenuhan Ham Provinsi Maluku Utara	Rp. 750.000	
4.	Kasubid Diseminasi Ham Kemenkum Ham Provinsi Maluku Utara	Rp. 750.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2014
TANGGAL 17 Juni 2014

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	James S.Sumlang, SH	Rp. 500.000	
2.	Nursani Djali,SH	Rp. 500.000	
3.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Rp. 500.000	
4.	Irawan S.Dissi, SH	Rp. 500.000	
5.	Bachtiar A kamis, SH	Rp. 500.000	
6.	Rina Rauf, SH	Rp. 500.000	
7.	Fahria Abdullah, SS	Rp. 500.000	
8.	Isnain Husen, S.Sos	Rp. 500.000	
9.	Andi Nurhayati Syamsu A.Md	Rp. 500.000	
10.	Sunardi Hi Usman	Rp. 500.000	
11.	Mitto Danta	Rp. 500.000	
12.	Muzakir Buya	Rp. 500.000	
13.	Muhammad Basri, SH	Rp. 500.000	
14.	Iskandar M. Nur, A.Md.Kom	Rp. 500.000	
15.	Kartini Rondonuwu	Rp. 500.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA